Copyright © 2026 The Author(s)
Didaktika: Jurnal Kependidikan Vol. 15 No. 2 Mei 2026

Implementasi Sistem Informasi Manajemen dan Implikasinya terhadap Layanan Administrasi Kepegawaian: Studi di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan

Anisa[1], Irawan Hadi Patanggu[2], Masmur M[3]
[1,2,3]Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, Indonesia

[1] anisauindk@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.58230/27454312.4042

Abstrak

Pengelolaan administrasi kepegawaian yang efektif merupakan faktor penting dalam mendukung kinerja organisasi sektor publik, khususnya pada lembaga peningkatan kualitas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam layanan administrasi kepegawaian di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan administrasi telah berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur dengan alur yang sistematis, mulai dari input data hingga penyelesaian administrasi. Pemanfaatan aplikasi seperti SIASN, SIPDASMEN, MYASN, E-KINERJA, dan SINDE mendukung berbagai layanan kepegawaian serta meningkatkan transparansi dan akurasi data. Namun, keterlambatan respon pada sistem pusat masih mempengaruhi kecepatan layanan. Penelitian ini berkontribusi menunjukkan bahwa Sisten Informasi Manajemen yang terintegrasi mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan administrasi kepegawaian, sekaligus menekankan pentingnya penguatan sistem integrasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi oleh pegawai, serta pengembangan platform internal untuk mendukung kinerja organisasi secara berkelanjutan.
Kata kunci: Sistem Informasi Manajemen, Layanan Administrasi, Kepegawaian

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pemerintahan dan pengelolaan sumber daya manusia. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengatur kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government di seluruh tingkat pemerintahan (Sakti Anggoro et al., 2024). Selanjutnya diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Afiqurrahman, 2023) merupakan transformasi dari era eGovernment menuju iGovernment (Integrated Government) (Nurlaila et al., 2021), hal ini menunjukan bahwa transformasi digital kini menjadi kebutuhan strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan adaptif terhadap perubahan zaman (A. Ma'sum et al., 2025). Perkembangan teknologi informasi mendorong instansi pemerintah untuk mengintegrasikan sistem kerja manual ke dalam sistem berbasis digital guna meningkatkan kualitas layanan publik. Salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan adalah administrasi kepegawaian, karena pengelolaan sumber daya manusia yang tertib, akurat, dan terintegrasi akan berpengaruh langsung terhadap kinerja

organisasi. Administrasi kepegawaian tidak hanya mencakup pencatatan data pegawai, tetapi juga meliputi pengelolaan kenaikan pangkat, mutasi, cuti, penilaian kinerja, hingga penyusunan laporan yang menjadi dasar pengambilan keputusan pimpinan.

Dalam konteks organisasi publik, penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) menjadi suatu keharusan dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi layanan kepada masyarakat. Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan konsep yang mengintegrasikan berbagai komponen seperti teknologi, proses, dan sumber daya manusia untuk menghasilkan informasi yang akurat dan relevan (Luqman Nuryana et al., 2024). Hal ini di perkuat juga dengan temuan yang dilakukan oleh (Septalina et al., 2022) tentang sistem informasi kepegawaian dapat membantu Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dalam mengolah data pegawai sehingga menghasilkan informasi yang dapat membantu dan memudahkan dalam mencari data pegawai khusunya data profil pegawai. Penggunaan database sebagai media penyimpanan membuat keamanan dan keutuhan data lebih terkontrol dengan baik.

Namun demikian, penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada lembaga pemerintahan, khususnya di bidang pendidikan, masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat empiris. Hasil survei menunjukkan bahwa masih ditemui kendala seperti keterlambatan sinkronisasi data, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan belum optimalnya koordinasi antar SKPD (Nazhira & Candradewini, 2025). Penelitian yang dilakukan oleh (Nurhasanah et al., 2023) juga menegaskan bahwa masih ditemukannya beberapa kendala yang menghambat implementasi kebijakan SIMPEG di Sekretariat DPRD Kabupaten Berau, antara lain kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas untuk mendukung kebijakan SIMPEG. Masalah ini semakin kompleks mengingat bahwa lembaga pendidikan memiliki karakteristik organisasi yang unik dengan berbagai pemangku kepentingan dan regulasi yang harus dipatuhi. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat di implementasikan secara optimal untuk mendukung layanan administrasi kepegawaian (Maulidina & Budiraharjo, 2025).

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) di berbagai lembaga pemerintahan dan pendidikan di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh (Wirawan, 2020) menunjukkan bahwa kendala mendasar di dalam penyelenggaran e-government dalam revolusi industri 4.0 berada di tingkat pemerintahan daerah dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi. Temuan ini diperkuat oleh penelitian (M. Ma'sum, 2024) yang menemukan bahwa keberhasilan implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada lembaga pendidikan dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dan dukungan kebijakan, kesiapan dan kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur teknologi, kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna, serta pelatihan berkelanjutan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan et al., 2023) integrasi data PNS menggunakan proses aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang sesuai arahan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga lebih memudahkan proses penyatuan data pegawai serta menghasilkan informasi yang membantu pengambilan keputusan manajemen kepegawaian disetiap perangkat daerah terkait.

Lebih lanjut, Studi yang dilakukan oleh (Shobri, 2024) menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) di lembaga pendidikan memerlukan strategi yang komprehensif, termasuk peningkatan pelatihan teknologi, manajemen perubahan yang efektif, dan pengembangan protokol keamanan data yang kuat. Penelitian tersebut menekankan pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses implementasi untuk memastikan keberhasilan sistem dan keamanan data. Namun demikian,

Copyright © 2026 The Author(s)

penelitian-penelitian tersebut lebih fokus pada konteks lembaga pendidikan tinggi atau instansi pemerintah secara umum, belum spesifik mengkaji implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada lembaga penjaminan mutu pendidikan tingkat provinsi, seperti lokasi penelitian ini.

Berdasarkan gambaran literatur yang telah diuraikan, dapat di identifikasi beberapa gambaran yang menjadi celah penelitian ini. Pertama, sebagian besar penelitian mengenai penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lebih banyak dilakukan pada konteks pemerintahan daerah umum atau lembaga pendidikan tinggi, sedangkan penelitian yang fokus pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada lembaga penjaminan mutu pendidikan, khususnya di tingkat provinsi, masih sangat terbatas. Kedua, penelitian-penelitian terdahulu belum secara spesifik mengkaji bagaimana Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat mendukung layanan administrasi kepegawaian yang memiliki karakteristik unik di lembaga penjaminan mutu pendidikan. Ketiga, masih minimnya penelitian yang mengintegrasikan perspektif implementasi teknis dengan aspek manajemen kepegawaian secara komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan cara memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah sebagai salah satu lembaga pendidikan tingkat provinsi di Indonesia. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan implementasi model yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lembaga penjaminan mutu pendidikan, serta rekomendasi strategi untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang spesifik pada lembaga penjaminan mutu pendidikan tingkat provinsi yang belum banyak diteliti sebelumnya, serta analisis pendekatan yang mengintegrasikan aspek teknis sistem informasi dengan aspek manajemen kepegawaian secara komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan, khususnya dalam bidang implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) di lembaga pendidikan pemerintah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian dalam konteks organisasi yang spesifik, yaitu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta-fakta serta karakteristik implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian, termasuk prosedur layanan, integrasi teknologi, manajemen sumber daya manusia, serta evaluasi dan rencana pengembangan sistem. Subjek penelitian terdiri dari 6 informan utama yaitu sekretaris pimpinan, koordinator kepegawaian, admin kepegawaian, staf kepegawaian, dan pegawai pengguna layanan administrasi kepegawaian. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposif dengan kriteria: (1) memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, (2) memiliki pengalaman minimal satu tahun dalam mengoperasikan sistem informasi kepegawaian, dan (3) bersedia menjadi informan peneliti.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) digunakan untuk menggali informasi yang bersifat pribadi, reflektif, dan mendalam (Annasthasya et al., 2025). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan kerangka konsep penelitian. Setiap wawancara berlangsung selama ±30–60 menit dan dalam beberapa kasus dilakukan lebih dari satu kali per informan untuk memperdalam dan mengklarifikasi data. Pedoman wawancara mencakup empat tema utama, yaitu: (1) prosedur dan standar layanan

kepegawaian, (2) integrasi informasi teknologi, (3) manajemen sumber daya manusia, dan (4) evaluasi serta rencana pengembangan sistem. Seluruh proses wawancara didokumentasikan melalui pencatatan dan perekaman (dengan persetujuan informan) guna menjaga keakuratan data. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif miles, huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sri Annisa & Mailani, 2023) yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai jenuh (Nurrisa & Hermina, 2025). Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring dan merangkum data mentah dari hasil wawancara. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur sesuai dengan tema penelitian. Tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan temuan yang muncul dari hasil analisis data. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif (Vera Nurfajriani et al., 2024). Selain itu, dilakukan juga pengecekan data dengan dokumen-dokumen pendukung seperti Standar Oprasional Prosedur (SOP), laporan kinerja, dan dokumentasi sistem informasi manajemen kepegawaian yang digunakan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian secara terstruktur dan sistematis berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sebagai pedoman utama. Layanan yang dilaksanakan mencakup manajemen karier pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, pengurusan pensiun, serta administrasi kesejahteraan pegawai. Temuan utama menunjukkan bahwa seluruh tahapan layanan dimulai dari penginputan data pegawai, verifikasi berkas, hingga penyelesaian administrasi. Setiap tahapan dalam standar operasional pprosedur telah dilengkapi dengan standar waktu yang jelas untuk memberikan kepastian layanan. Dalam proses mutasi internal, penelitian menemukan bahwa penempatan pegawai didasarkan pada matriks kompetensi pegawai sebagai acuan utama dalam menentukan penempatan dan mutasi pegawai. Matriks tersebut berisi informasi mengenai kemampuan, keahlian, serta kualifikasi yang dimiliki oleh setiap pegawai, dengan keputusan akhir merupakan kewenangan pimpinan.

Selanjutnya hasil temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah telah didukung oleh pemanfaatan teknologi melalui Sistem Informasi Manajamen (SIM) yang terintegrasi secara nasional. Penggunaan sistem digital menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas dan efisiensi layanan administrasi, terutama dalam pengelolaan data pegawai dan proses pengusulan administrasi. Adapun aplikasi kepegawaian yang digunakan dalam proses administrasi kepegawaian di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut.

Tabel 1. Aplikasi Kepegawaian yang Digunakan di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah

Nama Aplikasi	Fungsi Utama dalam Layanan Kepegawaian
SIASN	Pengelolaan data ASN terpadu, riwayat karir, kepangkatan

Copyright © 2026 The Author(s)

SIPDASMEN	Manajemen sumber daya manusia spesifik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
MYASN	Layanan mandiri ASN untuk cek data, gaji, dan usulan
E-KINERJA	Pemantauan dan pelaporan capaian kinerja harian/bulanan
SINDE	Pengelolaan data terpadu dan informasi kepegawaian internal

Aplikasi-aplikasi tersebut digunakan dalam berbagai tahapan layanan, mulai dari penginputan data, pembaruan informasi pegawai, hingga pengusulan administrasi ke tingkat pusat. Integrasi sistem ini memungkinkan terjadinya sinkronisasi data antara instansi daerah dengan sistem nasional. Penelitian juga menemukan bahwa bagian kepegawaian secara rutin melakukan pemantauan terhadap jadwal kenaikan pangkat, mutasi, serta kenaikan gaji berkala melalui sistem digital. Seluruh proses pengusulan administrasi dilakukan secara daring, dengan berkas diunggah ke dalam sistem untuk diproses lebih lanjut pada tingkat pusat. Khusus untuk layanan kenaikan pangkat dan mutasi tertentu yang memerlukan persetujuan tingkat pusat, proses pengusulan dilakukan melalui sistem informasi yang telah terintegrasi.

Selanjutnya temuan tentang manajemen sumber daya manusia menunjukkan bahwa setiap staf di bagian kepegawaian memiliki deskripsi tugas yang jelas sesuai dengan jabatan masing-masing. Penelitian juga menemukan bahwa instansi melakukan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan yang dilaksanakan secara berkala, dengan fokus pada peningkatan kemampuan teknis dalam pengoperasian aplikasi kepegawaian berbasis digital. Selain itu, kompetensi data yang telah disusun oleh bagian kepegawaian menjadi bahan pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan mutasi oleh pimpinan.

Penelitian mengidentifikasi dua kendala utama dalam pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian. Pertama, keterlambatan respons sistem pusat dalam proses verifikasi akhir, di mana penyelesaian akhir tetap bergantung pada kecepatan respon dari sistem pusat meskipun seluruh tahapan di tingkat instansi telah diselesaikan sesuai standar operasional prosedur. Kedua, ditemukannya ketidaksesuaian antara data yang di input dalam sistem dengan dokumen fisik yang dimiliki oleh pegawai, yang dapat mempengaruhi proses verifikasi dan menyebabkan terhambatnya penyelesaian layanan administrasi.

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Instansi menerapkan proses pengecekan data berlapis untuk memastikan kesesuaian berkas sebelum diusulkan ke tingkat pusat. Selain itu, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan pemutakhiran data secara rutin sebagai bagian dari sistem pemantauan administrasi kepegawaian. Penelitian juga menemukan adanya upaya untuk mengembangkan sistem pemantauan internal yang dapat menampilkan data pegawai secara *real-time* guna membantu pengelolaan administrasi serta pengambilan keputusan.

Secara umum, temuan penelitian terkait proses layanan dan implementasi sistem dapat dirangkum pada tabel hasil implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam layanan administrasi kepegawaian di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Implementasi SIM dalam Layanan Administrasi Kepegawaian

Aspek	Hasil Temuan	Keterangan
Prosedur Layanan	Mengacu pada stadar operasional prosedur	Memuat tahapan dan standar waktu
Tahapan Administrasi	Input – Verifikasi – Proses – Usulan	Dilaksanakan secara sistematis
Mutasi	Berdasarkan Matriks Kompetensi	Diputuskan pimpinan
Kenaikan Pangkat	Pengusulan melalui sistem daring	Terintegrasi nasional
Monitoring	Pemutakhiran data berkala	Mengontrol jadwal kenaikan gaji berkala & pensiun
Implementasi Sistem Informasi Manajemen	Aplikasi terintegrasi, SIASN, SIPDASMEN, MYASN, E-KINERJA, dan SINDE	Mendukung efisiensi kerja
Kendala	Keterlambatan respon verifikasi pusat	Penyelesaian akhir tingkat nasional

Berdasarkan seluruh temuan, implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah telah diterapkan dalam setiap aspek tahapan pelayanan administrasi kepegawaian. Sistem informasi digunakan dalam proses penginputan data, verifikasi dokumen, pengusulan kenaikan pangkat dan mutasi, serta monitoring jadwal administrasi pegawai. Digitalisasi administrasi telah mengubah proses pengusulan yang sebelumnya manual menjadi sistem daring, sehingga data pegawai tersimpan dalam sistem berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan pusat. Pembaruan data dilakukan secara berkala untuk menjaga akurasi informasi dalam sistem. Meskipun masih terdapat kendala dalam proses verifikasi di tingkat pusat, setiap tahapan pelayanan dapat dipantau dan dikendalikan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan dalam standar operasional prosedur.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam layanan administrasi kepegawaian di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah telah berjalan secara sistematis melalui integrasi antara prosedur kerja dan sistem digital. Proses layanan yang meliputi penginputan data, verifikasi dokumen, hingga pengusulan menunjukkan bahwa fungsi Sistem Informasi Manajemmen (SIM) tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian layanan. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi sistem informasi manajemen tidak berdiri sendiri pada aspek teknologi, melainkan ditentukan oleh kesesuaian antara sistem dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur alur kerja secara jelas dan terukur.

Copyright © 2026 The Author(s)

Keberhasilan implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam penelitian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Pertama, yaitu kejelasan standar oprasional prosedur menjadi fondasi utama yang memastikan bahwa setiap tahapan layanan dapat diintegrasikan ke dalam sistem secara konsisten. Tanpa standar oprasional prosedur yang terstandarisasi, penggunaan sistem informasi berpotensi tidak optimal karena tidak memiliki acuan proses yang baku. Kedua, pemanfaatan sistem digital terintegrasi memungkinkan pengelolaan data kepegawaian dilakukan secara lebih sistematis, terdokumentasi, dan mudah ditelusuri. Hal ini memperkuat fungsi sistem informasi manajemen dalam mendukung ketepatan waktu layanan, khususnya dalam pemantauan siklus administrasi seperti kenaikan gaji, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), dan masa pensiun.

Namun demikian, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut tidak sepenuhnya bebas dari batasan. Salah satu faktor penghambat utama adalah keterlambatan respon terhadap sistem pusat dalam proses verifikasi akhir . Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem di tingkat daerah telah berjalan optimal, efektivitas layanan tetap dipengaruhi oleh tanggung jawab sistem di tingkat nasional. Dengan demikian, penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam konteks organisasi pemerintah bersifat bergantung pada struktur birokrasi yang berlaku , sehingga keberhasilan di tingkat lokal tidak selalu sejalan dengan hasil akhir layanan.

Selain itu, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara data digital dan dokumen fisik , yang mengindikasikan bahwa kualitas input data masih menjadi tantangan dalam implementasi sistem. Permasalahan ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan pengguna dalam menjaga konsistensi data. Oleh karena itu, faktor sumber daya manusia tetap menjadi elemen penting yang menentukan keberhasilan sistem, tidak hanya dari sisi kemampuan teknis, tetapi juga dari ketelitian dalam pengelolaan data.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini memang sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa implementasi aplikasi SIMPEG didukung oleh sumber daya manusia, perangkat, dan jaringan yang menunjang layanan pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) sehingga menjadi alat yang signifikan dalam pengambilan keputusan administrasi kepegawaian (Muin et al., 2024), lebih lanjut sistem informasi kepegawaian mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi layanan administrasi (Lubis & Veri, 2025). Selain itu, evaluasi layanan SIMPEG mengungkapkan bahwa sistem informasi manajemen kepegawaian mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik, meskipun masih terdapat kebutuhan peningkatan pengelolaan layanan yang profesional (Primayura & Prasetyo, 2024). Penelitian tersebut memperkuat argumen bahwa Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi dengan eGovernment meningkatkan kualitas layanan administrasi di berbagai tingkat pemerintahan di Indonesia. Sejalan dengan itu, penelitian yan dilakukan oleh (Putri Febrianti & Nurlaila Nurlaila, 2024) juga menunjukkan bahwa penerapan SIMPEG telah berlangsung sesuai fungsi utamanya untuk mewujudkan e-Government dan meningkatkan kualitas layanan administrasi pegawai. Temuan ini searah dengan hasil penelitian saat ini yang menunjukkan peran strategis Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam mempermudah pencatatan data, akses informasi, serta proses pengambilan keputusan. Namun penelitian ini memberikan penekanan yang lebih kritis bahwa keberhasilan tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan sangat dipengaruhi oleh kesiapan internal organisasi dan keterhubungan dengan sistem eksternal.

Beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa implementasi SIMPEG dapat mengalami kendala apabila tidak didukung oleh kompetensi sumber daya manusia dan kejelasan prosedur (Hilda Salsabillah & Mursyidah, 2022) , kurangnya pelatihan operator, ketidaksesuaian kompetensi sumber daya manusia, dan kekurangan SOP yang jelas (Cipta

Widyawan et al., 2020). Hal ini memperkuat temuan bahwa faktor keberhasilan dan kegagalan implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) tidak hanya terletak pada teknologi, tetapi pada interaksi antara sistem, manusia, dan kebijakan organisasi.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) mampu meningkatkan keteraturan prosedur, akurasi data, dan kemampuan pemantauan layanan administrasi kepegawaian. Namun efektivitas tersebut mensyaratkan adanya pemutakhiran data secara konsisten serta penguatan mekanisme kontrol internal seperti verifikasi berlapis. Tanpa hal tersebut, sistem informasi berpotensi menghasilkan data yang tidak akurat dan berdampak pada kualitas pengambilan keputusan.

Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam organisasi publik dengan menegaskan bahwa sistem informasi manajemen tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme koordinasi dan pengendalian organisasi. Selain itu, temuan terkait keterlambatan respon pada sistem pusat menunjukkan bahwa implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam sektor publik perlu dipahami dalam kerangka sistem yang saling terhubung (*interconnected system*), di mana efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh unit organisasi, tetapi juga oleh stabilitas sistem yang lebih luas.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain penggunaan pendekatan kualitatif yang bergantung pada persepsi informan, cakupan penelitian yang terbatas pada satu instansi yaitu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, hal ini membatasi generalisasi temuan ke instansi lain dengan karakteristik organisasi yang berbeda serta tidak adanya pengukuran kuantitatif terhadap tingkat efisiensi layanan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap sistem pusat menyebabkan evaluasi tidak dapat dilakukan secara menyeluruh pada seluruh alur proses layanan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan campuran (*mixed method*) guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, serta memperluas objek penelitian ke berbagai instansi untuk melihat perbandingan Implementasi sistem informasi Manajemen (SIM). Penelitian lanjutan juga perlu mengkaji pengaruh faktor eksternal seperti stabilitas sistem pusat dan kebijakan nasional, serta memasukkan variabel seperti kualitas sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur, dan budaya organisasi untuk memperdalam analisis terhadap keberhasilan implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM).

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam administrasi kepegawaian di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah telah terintegrasi dalam seluruh tahapan proses administrasi dan berkontribusi pada keteraturan prosedur, akurasi data, serta kemudahan monitoring. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterlambatan respons sistem nasional pada verifikasi akhir, sehingga keberhasilan implementasi bersifat kontekstual dan perlu digeneralisasi secara hati-hati. Secara teoritis penelitian ini memperkaya kajian tentang sistem informasi manajemen di sektor publik dengan menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen (SIM) berperan ganda sebagai instrumen teknis sekaligus mekanisme pengendalian administrasi ini menawarkan perspektif baru tentang integrasi sistem informasi menajamen dalam administrasi kepegawaian yang mempertimbangkan faktor kontekstual organisasi dan interkoneksi sistem nasional. Secara praktis penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pengelola kepegawaian untuk memperkuat koordinasi vertikal dengan sistem nasional guna mengatasi keterlambatan

Copyright © 2026 The Author(s)

verifikasi, serta menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dan karakteristik organisasi sebagai syarat keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen. Secara metodologis, penelitian ini terbatas pada pendekatan kualitatif di satu instansi sehingga temuan bersifat deskriptif dan belum mengukur dampak secara kuantitatif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) dengan menambahkan analisis kuantitatif guna mengukur secara lebih objektif tingkat efisiensi waktu layanan, akurasi data, serta dampak implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) terhadap kinerja administrasi kepegawaian. Penggunaan indikator terukur seperti durasi penyelesaian layanan, tingkat kesalahan administrasi, dan kepuasan pegawai akan memperkuat validitas temuan dan memperluas kontribusi empiris penelitian di bidang sistem informasi manajemen sektor publik.

References

Afiqurrahman, H. S. R. Y. (2023). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja*.

Cipta Widyawan, D., Idris, A., Magister Administrasi FISIP Unmul, M., & Magister Administrasi FISIP Unmul Alamat Korespondensi, D. (2020). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA SAMARINDA. In *Jurnal Administrative Reform* (Vol. 8, Number 2).

Hilda Salsabillah, matus, & Mursyidah, L. (2022). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo. *Web Of Scientist: International Scientific Research Journal*, *1*(4). https://doi.org/10.47134/webofscientist

Lubis, D. W., & Veri, J. (2025). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN:SYSTEMATIC REVIEW. *Jurnal Manajamen Informatika Jayakarta*, *5*(2), 135. https://doi.org/10.52362/jmijayakarta.v5i2.1802

Luqman Nuryana, M., Arifudin, O., Uin, S., Gunung, D., & Bandung, I. (2024). IMPLEMENTASI DAN TRANSFORMASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DI ERA DIGITAL. In *Jurnal Tahsinia* (Vol. 5, Number 9).

Ma'sum, A., Purwanto, H., & Nugraha, R. W. (2025). Tinjauan Literatur: Dampak Transformasi Digital terhadap Pengambilan Keputusan di Lembaga Pemerintahan. *Jurnal Algoritma*, *22*(2). https://doi.org/10.33364/algoritma/v.22-2.3091

Ma'sum, M. (2024). Inovasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Santri di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi. *MANAGIERE: Journal of Islamic Educational Management*, *3*(1), 53–66. https://doi.org/10.35719/managiere.v3i1.2002

Maulidina, H., & Budiraharjo, E. (2025). Analisis Sistem Informasi Kepegawaian di BNN. *Jurektik*, *02*, 2025.

Muin, M. S., Tinggi, S., Ekonomi, I., Kendari, E.-E., Muthalib, A. A., & Supriaddin, N. (2024). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH) Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) untuk Mendukung e-Government pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara INFO PENULIS*. *4*(2). http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajshhttp://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

Nazhira, A. Z., & Candradewini, ; Candradewini. (2025). OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA KOTA CIREBON. *Jurnal Administrasi Negara), Agustus*, *17*, 60–71. https://doi.org/10.24198/jane.v17i1.62438

Nurhasanah, N., Lisman Manurung, & Siti Julaeha. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, *11*(1). https://doi.org/10.31289/publika.v11i1.9521

Nurlaila, A., Tiyas, I. ;, & Haryani, N. (2021). E-Government di Kota Surakarta dilihat dari Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. In *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* (Vol. 1, Number 1).

Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data*. *02*, 793–800.

Primayura, S., & Prasetyo, K. W. (2024). *Evaluasi Pengelolaan Layanan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang*.

Putri Febrianti, & Nurlaila Nurlaila. (2024). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, *2*(2), 10–21. https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i2.1690

Sakti Anggoro, T., Ricky Martin Purba, G., & Rahayu, H. (2024). Implementasi E-Government Sebagai Bentuk Perwujudan Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, *4*, 4521–4535.

Septalina, I., Utami, M., Risky Virmansyah, M., Elvanso, J. T., & Hi-Dayat, Y. (2022). SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BERBASIS WEB PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU. *JURNAL SISTEM INFORMASI DAN E-BISNIS*. https://jurnal.ikhafi.or.id/index.php/jusibi

Setiawan, I., Aditia, R., & Hidayat, M. R. R. (2023). Penerapan Integrasi Data Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, *5*(1), 41–61. https://doi.org/10.33701/jtkp.v5i1.3416

Shobri, M. (2024). Peran Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Pendidikan Islam. *AKSI: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *2*(2), 78–88. https://doi.org/10.37348/aksi.v2i2.302

Sri Annisa, I., & Mailani, E. (2023). Faktor Penyebab Kesulitan Siswa Dalam Pembelajaran Tematik Dengan Menggunakan Metode Miles Dan Huberman Di Kelas Sd Negeri, Analisis IV. *Journal Of Social Science Research*, *3*, 6469–6477.

Vera Nurfajriani, W., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., Afgani, W., Negeri, U. I., Fatah, R., & Abstract, P. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *10*(17), 826–833. https://doi.org/10.5281/zenodo.13929272

Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *1*(1). https://doi.org/10.18196/jphk.1101